

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK BERBASIS LARVA MAGGOT DI KECAMATAN CINAMBO KOTA BANDUNG**

### **IMPLEMENTATION OF AN ORGANIC WASTE MANAGEMENT POLICY BASED ON MAGGOT LARVAE IN CINAMBO DISTRICT, BANDUNG CITY**

Arie Herdiana<sup>1</sup>, Pandji Santosa<sup>2</sup>, Dedi Mulyasana<sup>3</sup>  
ariesudjana@gmail.com<sup>1</sup>, pandjisantosa@gmail.com<sup>2</sup>, dedi.mulyasana@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Langlangbuana

#### **ABSTRAK**

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Menjadi Tantangan Besar Bagi Pemerintah Kota Bandung. Keberadaan Darurat Volume Sampah Yang Semakin Tinggi Di Kota Bandung Menyebabkan Dicari Solusi Atau Alternatif Lain Untuk Menanggulangi Penumpukan Sampah Masyarakat Yang Tidak Bisa Diangkut Ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Sarimukti. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot Di Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Pendekatan Kualitatif Dengan Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara Mendalam, Observasi, Dan Analisis Dokumen. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Faktor Utama Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Ini Meliputi Komunikasi antar aktor kebijakan, ketersediaan Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan mencakup kurangnya sosialisasi yang efektif, belum adanya standard operation Procedure (SOP) yang disepakati bersama dan komitmen bersama untuk penanggulangan darurat sampah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran. Serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan solusi yang komprehensif sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot dapat lebih efektif dalam penanggulangan darurat sampah di Kota Bandung.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Penanggulangan darurat sampah, Pengelolaan sampah, Magotisasi

#### **ABSTRACT**

*Implementation of Organic Waste Management Policy Based on Maggot Larvae in Cinambo District, Bandung City. Becomes a Big Challenge for the Bandung City Government. The Existence of an Increasingly High Waste Volume Emergency in Bandung City Causes the Search for Solutions or Other Alternatives to Overcome the Accumulation of Community Waste That Cannot Be Transported to the Final Waste Disposal Site in Sarimukti. This Study Aims to Analyze the Implementation of Organic Waste Management Policy Based on Maggot Larvae in Cinambo District, Bandung City.*

*The Research Method Used is a Qualitative Approach with Data Collection Techniques Through In-depth Interviews, Observations, and Document Analysis. The Results of the Study Show That the Main Factors Influencing the Implementation of This Policy Include Communication between Policy Actors, Availability of Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The main obstacles in policy implementation include the lack of effective socialization, the absence of a mutually agreed Standard Operating Procedure (SOP) and a joint commitment to dealing with waste emergencies.*

*To overcome these obstacles, the Government needs to improve communication between implementers, the availability of resources, both human and budgetary. And strengthen collaboration with various stakeholders with a more participatory approach and comprehensive solutions so that maggot-based waste management policies can be more effective in dealing with waste emergencies in Bandung City*

**Keywords :** Policy Implementation, Waste Emergency Management, Waste Management, Maggotization.

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan konsumsi, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap tahunnya. Sampah organik, yang mencakup sekitar 60-70% dari total sampah di Indonesia, sering kali tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

Idealnya tempat pembuangan akhir (TPA) hanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Fakta menunjukkan berbagai jenis sampah dari kegiatan manusia langsung diangkut dan dibuang ke TPA. Akibatnya kondisi TPA, khususnya di kota-kota besar melebihi kapasitas. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah terutama lingkungan dan kesehatan. Penanganan sampah lainnya oleh masyarakat masih dilakukan dengan cara dibakar di tempat terbuka dan tanpa kontrol sehingga berpotensi menimbulkan bahaya dan mencemari lingkungan.

Sebagian besar pengelolaan sampah yang diaplikasikan di Indonesia menggunakan metode pengumpulan terpusat yang diatur melalui Peraturan menteri PU/PR No.3/PRTM/2013. Peraturan ini menjelaskan pengelolaan sampah oleh pemerintah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar dengan penerapan sistem sanitary landfill, yaitu penimbunan sampah di TPA. Metode ini memiliki beberapa kelemahan. Pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah di Indonesia masih dianggap tidak

memadai karena sekitar 40% sampah dari kegiatan di kota-kota besar tidak terangkut ke TPA (Damanhuri & Padmi, 2010).

Awal mula terjadi darurat sampah dan bencana kebakaran di Tempat Pembuangan Kompos Sarimukti yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah dari Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi; Status Darurat Pengelolaan Sampah Bandung Raya terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 24 Desember 2023.

Oleh karena itu, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melakukan penutupan pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kondisi tersebut dipastikan sangat berdampak terhadap pengangkutan sampah dan kebersihan di seluruh wilayah Kota Bandung. Oleh karena itu diharapkan seluruh pihak dapat ikut serta gotong royong membantu penanganan sampah ini. Khusus untuk di Kota Bandung, Walikota Bandung menerbitkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.2403-DLH/2023 Tentang penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana sampah Kota Bandung.

Ini adalah peraturan yang menjadi dasar hukum bagi penanganan darurat sampah di Kota Bandung dengan bertujuan untuk mempercepat penanganan sampah dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sampah. Peraturan ini berisi berbagai langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi masalah sampah seperti pembentukan Satuan Tugas penanganan sampah terpadu, penguatan Program Kawasan Bebas Sampah (KBS), optimasi lubang olah organik, pembatasan ritasi pengangkutan sampah, peningkatan pemilihan

sampah di sumber dan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pengelolaan sampah. Adapun khusus untuk penanggulangan darurat sampah yang dikelola oleh kecamatan dan kelurahan ada di No.6 kelompok kerja pengembangan system pengelolaan sampah darurat dan permanen bagian hurup E Bidang penjamin pemanfaatan kompos, maggot, RDF dan materi daur ulang dan No. 8 kelompok kerja edukasi, penegakan hukum dan pelibatan Masyarakat bagian hurup G Bidang pengumpulan sampah terpilah dan pengelolaan sampah organik pada kawasan perumahan dan pemukiman.

Selain itu Keputusan Walikota ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Plh.Sekretaris Daerah Kota Bandung No.131-DLH/2023 Tentang Penanganan Sampah Dampak Penutupan TPA Regional Sarimukti Akibat Kebakaran dan memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah, Para Camat, Lurah, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga untuk menyampaikan informasi kepada seluruh warga agar tidak membuang sampah ke TPA Sarimukti dan menghimbau setiap warga melakukan pengelolaan sampah secara mandiri melalui kegiatan "Kang Pisman (Kurang, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah) yaitu memisahkan sampah organik-anorganik-residu. Sampah organik terpisah selanjutnya diolah menjadi kompos, magotisasi, brodigester atau lainnya. Untuk sampah anorganik terpisah dapat disetorkan ke bank sampah atau sedekah sampah.

Hal ini menjadi momentum pengelolaan sampah di Kota Bandung yang tidak bergantung kepada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (IPPAS) Sarimukti dengan cara melakukan pemilahan sampah sisa makanan dan dedaunan secara mandiri di dalam kawasan area kegiatan dengan menggunakan metode seperti bata terawang lubus kompos, rotary klin dram komposter, biodigester, Black Soldier Fly (magotisasi), atau windrow composting.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbagai kebijakan dan inisiatif telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu pendekatan

inovatif yang mulai mendapatkan perhatian adalah penggunaan larva maggot atau larva Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) dalam pengelolaan sampah organik. Larva maggot memiliki kemampuan untuk menguraikan sampah organik dengan cepat dan efisien, serta menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat seperti pupuk organik dan protein hewani yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot dapat memberikan berbagai keuntungan baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Dari sisi lingkungan, teknologi ini dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta menurunkan emisi gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik. Dari sisi ekonomi, budidaya larva maggot dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat serta mengurangi biaya pengelolaan sampah.

Kota Bandung memiliki 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, salah satu kecamatan yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah di Kecamatan Cinambo yang berada di wilayah timur Kota Bandung, hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dibentuklah Kecamatan Cinambo sebagai salah satu dari 4 (empat) Kecamatan hasil pemekaran yang diresmikan oleh Walikota Bandung H. Dada Rosada pada tanggal 22 Maret 2007 dengan Luas Wilayah Kecamatan Cinambo kurang lebih : 454,93 Ha. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2007 tentang pemekaran perubahan dan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam daerah Kota Bandung bahwa tujuan yang dilakukannya adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan mengingat jarak antara pusat Kecamatan dan Kelurahan yang cukup jauh serta semakin meningkatnya Kepadatan penduduk pada beberapa Kecamatan.

Studi kasus ini akan fokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Babakan Penghulu dengan menggunakan larva maggot di Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

Kecamatan Cinambo Kota Bandung harus melaksanakan instruksi yang dikeluarkan oleh Walikota untuk penanganan darurat sampah walaupun dalam kenyataannya telah menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah organik, termasuk keterbatasan lahan TPA dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemilahan sampah. Melalui kebijakan ini, pemerintah kota bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, untuk meningkatkan pengelolaan sampah organik dan mempromosikan budidaya larva maggot sebagai solusi yang berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada gejala yang bersifat naturalistik atau alamiah, bertujuan untuk memahami permasalahan manusia maupun sosial. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan cara yang mendalam dan holistik. Pendekatan ini berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, dengan tujuan untuk mengungkap kompleksitas perilaku manusia dan interaksi sosial (Patton, M. Q. (2015).

Sedangkan menurut (Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial dari perspektif individu yang terlibat. Metode ini bertujuan untuk mengungkap makna, pandangan, dan pengalaman

melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada proses, konteks, dan interpretasi subjektif partisipan.

Menurut Sugiyono (2012:1) yang dimaksud dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot di Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Dalam proses penanggulangan darurat sampah di Kota Bandung, Kecamatan Cinambo melaksanakan instruksi Walikota untuk melakukan pengolahan sampah dari sumber yaitu dari sampah rumah tangga. Salah satu kebijakan yang diambil oleh kecamatan Cinambo adalah dengan melakukan pengolahan sampah dengan berbasis larva maggot, ini dibuktikan dengan keluarnya Surat Edaran Camat Cinambo Nomor 526-Kec.Cnb/2023 Tentang Penutupan Pembuangan Sampah ke TPA Sarimukti, Surat Keputusan Lurah Babakan Penghulu Nomor : 012 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah di Kelurahan Babakan Penghulu.

Camat Cinambo sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Bandung menjadi pelaksana di lapangan, mencari anggaran dan melakukan komunikasi dengan jajaran terkait seperti para lurah, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan dan para RW/RT untuk penanggulangan darurat sampah di kewilayahan. Selain itu Bapak Camat juga melakukan komunikasi internal dengan para Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam implemtnasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan, semua personil baik petugas pengangkut sampah, petugas gober, petugas pengelola maggot, lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan (LKK), pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup dapat membangun komunikasi yang baik. Dimana setiap petugas kebersihan dan petugas gober bergerak untuk mengumpulkan sampah rumah tangga, sampah organik dapur (SOD) dari rumah tangga (per RW) dikumpulkan di pusat organik kelurahan (Rumah Magot) untuk diproses magotisasi.

Dari sisi anggaran, Bapak Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) menginstruksikan Para Lurah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) di kelurahan agar segera mengeksekusi (pencairan) anggaran pelaksanaan pembangunan rumah maggot termasuk sarana prasarana pendukungnya, anatar lain Set paket Budidaya Maggot senilai Rp. 122.652.000 (Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk dijual/diserahtherimakan kepada masyarakat) terdiri dari 1.000 unit boks maggot (ukuran 40cmX20cmX15 cm), 100 m<sup>2</sup> rak maggot, 5 m<sup>2</sup> ruang penetasan, 105 m<sup>2</sup> rangka atap (rumah maggot). Target pengolahan sampah organik dapur adalah 1 ton/hari setiap kelurahan.

Lurah Babakan Penghulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menginstruksikan Kasie Ekonomi Pembangunan selaku PPTK untuk segera melakukan penyerapan anggaran pembuatan rumah maggot. Selain itu Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Babakan Penghulu melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat termasuk penggiat lingkungan pengolahan larva maggot, para RW dan LKK setempat untuk menginventarisir terkait ketersediaan lahan, sarana dan prasarana, kelengkapan teknis termasuk desain rumah maggot dan juga mencari dan seleksi petugas pengelola maggot.

laporan data larva maggot di Kelurahan Babakan Penghulu, dapat disampaikan informasi selama Bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2024 data dari 8 RW yang ada di Kelurahan Babakan Penghulu, hanya di dua RW yang bisa menjalankan program magotisasi sesuai dengan tempat rumah maggot berada, sehingga sampah rumah tangga yang berada di dua RW tersebut

maksimal terserap oleh program magotisasi. Namun sisa di 6 RW juga tetap terserap namun belum maksimal, tetapi ada system pengolahan sampah lain yang diterapkan misalnya melalui komposisasi dan Wasima.

Selain itu program sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah melalui magotisasi cenderung kurang maksimal, ini dikarenakan terdesaknya keadaan darurat sampah yang menimpa Kota Bandung. Selain itu sosialisasi tentang pembangunan rumah maggot dilaksanakan secara tergesa-gesa, sehingga pengetahuan teknologi magotisasi pun terkesan belum terserap ilmu nya, ditambah petugas pelaksanapun belum tersedia, belum dilakukan Pendidikan dan pelatihan. Minimnya pengetahuan dan informasi tentang program magotisasi yang diterima warga menjadi masalah tersendiri. Masyarakat masih kebingungan dengan program ini.

Namun sekat komunikasi ini segera cair berkat keterlibatan unsur LKK, Forum RW dan Penggiat Lingkungan yang ada di Kecamatan Cinambo dengan memberikan pemahaman program magotisasi secara gencar kepada warga masyarakat. Selain itu tersedianya anggaran pembangunan rumah maggot beserta sarana prasarana lainnya memberikan semangat kepada Masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah melalui magotisasi segera teralisasi.

### **Faktor Kendala Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot di Kecamatan Cinambo Kota Bandung**

1. Kebijakan yang tidak jelas atau kurang mendukung sepenuhnya yang mengatur pengelolaan sampah berbasis larva maggot. Peraturan yang tidak jelas bisa menghambat implementasi program. Ini terkait kebijakan yang dikeluarkan terkesan jangka pendek karena ada persoalan darurat sampah di Kota Bandung
2. Keterbatasan tentang Teknologi budidaya dan pengolahan larva maggot masih tergolong baru dan mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh semua pelaku.

3. Pada skala besar, ada risiko dampak lingkungan yang tidak terduga, seperti masalah bau atau hama jika tidak dikelola dengan baik.
4. Kurangnya Anggaran yang semulanya untuk pengelolaan sampah organik menjadi rumah larva maggot.
5. Kurangnya Sosialisasi yang tidak merata dan kurang efektif mengenai program pengelolaan sampah organik berbasis larva maggot sehingga bisa menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah.

### **Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva Maggot di Kecamatan Cinambo Kota Bandung**

Pemerintah Kota Bandung melalui Pemerintah Kewilayahan melakukan kampanye informasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai unsur, seperti penyuluhan langsung oleh pihak aparat kewilayahan, pihak Bahabinkamtibmas, pihak Babinsa, forum RW, LPM dan PKK kepada warga masyarakat akan program pengelolaan sampah melalui magotisasi. Penjelasan yang detail tentang manfaat kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya akan mengurangi dis-informasi di kalangan masyarakat. Keterlibatan unsur masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan dalam pengelolaan sampah berbasis larva maggot membuat Masyarakat semakin yakin mendukung program kebijakan ini. Melalui forum diskusi antara pemerintah dan pelaksana di lapangan membuat kebijakan ini cepat terealisasi.

Keterbatasan teknologi pengelolaan sampah melalui magotisasi sedikit terpecahkan berkat keterlibatan para penggiat lingkungan yang berada di kecamatan cinambo dalam mensosialisasikan teknik dan tahapan teknologi pengelolaan sampah berbasis larva maggot (magotisasi). Selain itu pemuda karang taruna setempat turut terlibat dalam mensosialisasikan melalui media social.

Dampak lingkungan yang dihasilkan seperti bau dan limbah air yang kotor dapat disikapi dengan pembuatan rumah maggot secara terukur

dan rapih, sehingga sebisa mungkin efek timbulnya bau akan diminimalisir.

Terkait anggaran, sebenarnya sudah direncanakan dalam anggaran perubahan daerah, ini bisa dibuktikan dengan keluarnya anggaran perubahan pada bulan Oktober 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Dari sisi anggaran, Bapak Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) menginstruksikan Para Lurah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) di kelurahan agar segera mengeksekusi (pencairan) anggaran pelaksanaan pembangunan rumah maggot termasuk sarana prasarana pendukungnya, anatar lain Set paket Budidaya Maggot senilai Rp. 122.652.000 (Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk dijual/diserahterimakan kepada masyarakat) terdiri dari 1.000 unit boks maggot (ukuran 40cmX20cmX15 cm), 100 m<sup>2</sup> rak maggot, 5 m<sup>2</sup> ruang penetasan, 105 m<sup>2</sup> rangka atap (rumah maggot). Target pengolahan sampah organik dapur adalah 1 ton/hari setiap kelurahan.

### **Pembahasan**

Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Organik berbasis Larva Maggot di Kecamatan Cinambo sebagai momentum pengelolaan sampah di Kota Bandung yang tidak bergantung kepada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (IPPAS) Sarimukti dengan cara melakukan pemilahan sampah sisa makanan dan dedaunan secara mandiri atau bisa disebut Sampah Organik Dapur (SOD) di dalam kawasan area kegiatan dengan menggunakan metode Black Soldier Fly (magotisasi). Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dikomunikasikan dan diterapkan di lapangan (Edward III, 1980).

Salah satu aspek yang penting dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi antar aktor kebijakan. Pemerintah Kota Bandung perlu memastikan bahwa informasi mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan sampah melalui magotisasi disampaikan dengan jelas dan

transparan. Namun, berdasarkan wawancara, banyak di antara mereka yang merasa kurang mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Cinambo Hakim Setiabudi menyatakan bahwa

“Program penanggulangan darurat sampah harus dimulai dari pengelolaan sampah secara mandiri dari sumber (Sampah Rumah Tangga) untuk itu saya selaku Camat Cinambo membuat Surat Edaran kepada seluruh Lurah, Para RW, Para LKK dan Tokoh Masyarakat Penggiat Lingkungan”.

Minimnya komunikasi menyebabkan resistensi di masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini lebih bersifat tergesa-gesa dan jangka pendek demi terurainya penumpukan sampah di lokasi pembuangan sampah akhir sementara (TPAS). Hasil wawancara dengan Bapak Camat Cinambo Hakim Setiabudi, S.Sos :

“kebijakan ini memang tergesa-gesa demi untuk Kota Bandung keluar dari masalah darurat sampah. Walaupun tergesa-gesa tapi ada aksi nyata dengan dibuktikan dengan keluarnya anggaran perubahan untuk pembiayaan Pembangunan rumah maggot sebagai sarana untuk menampung sampah organik dari Masyarakat (SOD) sehingga tidak terpaku pada pengangkutan sampah dikirim ke TPAS.

Pernyataan ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Lurah Babakan Penghulu Bapak Ana, S.Sos dan Lurah Sukamulya Bapak Ikhsan Furqon

“sudah terdapat pembiayaan pembanguna rumah maggot dari DPA perubahan tahun 2023. Kami selaku KPA siap melakukan penyerapan anggaran untuk Pembangunan rumah maggot sebagai sarana menampung Sampah Organik Dapur (SOD).

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu faktor sumber daya yang tersedia, juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup aspek finansial (anggaran), infrastruktur (lahan), kapasitas petugas yang mengelola sampah serta bibit larva. Menurut Wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Cinambo Ibu Nunung Siti Nurfaridah, SE menyatakan

“Secara anggaran memang sudah siap, tetapi secara lahan Pembangunan rumah maggot dan petugas pengelola Rumah maggot belum tersedia. Tetapi kami terus berusaha berkomunikasi dengan instansi lain untuk mencari lahan dan menyiapkan petugas pengelola rumah maggot”.

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Babakan Penghulu Bapak Hendra Nugraha, S.Sos menyatakan bahwa

“Seiring dengan Pembangunan Rumah Maggot, DLHK juga sudah mempersiapkan petugas rumah maggot untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan melalui program padat karya selama 2 minggu dengan diberi honor perhari Rp. 150.000.”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Lurah Babakan Penghulu Bapak Ana, S.Sos “Betul sudah ada Program padat karya untuk persiapan petugas pengelola maggot bekerja tahun 2024 dengan diberi honor Rp. 1500.000 per bulan”

Apabila salah satu aspek sumber daya ini tidak terpenuhi maka implementasi kebijakan ini tidak akan mencapai tujuan secara maksimal. Namun, penting untuk diingat bahwa sumber daya bukan hanya tentang anggaran dan fasilitas, tetapi juga tentang komitmen politik dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Bandung perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan yang cukup untuk implementasi

kebijakan. Hasil wawancara dengan Pengelola Rumah Maggot Bapak Azis Muslim :

“Alhamdulillah kami diberi tugas sebagai pengelola rumahmaggot dengan honor Rp. 1.500.000, per bulan, ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung.

Secara keseluruhan, analisis triangulasi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang terbatas, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas, menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot. Tanpa adanya alokasi sumber daya yang memadai dan pemanfaatan yang efektif, kebijakan ini sulit untuk mencapai tujuannya secara optimal. Oleh karena itu, perbaikan dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan dukungan bagi pelaksana di lapangan sangat diperlukan agar kebijakan pengelolaan sampah ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberi manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Disposisi adalah bagaimana pemahaman akan tujuan kebijakan ini dilakukan, sehingga memunculkan komitmen bersama untuk menyelesaikan darurat sampah di Kota Bandung melalui penguraian sampah rumah tangga menjadi larva maggot yang notabene akan menghasilkan efek ekonomi menjadi pakan ternak yang bisa dijual kepada Masyarakat. Hasil wawancara dengan Petugas Pengelola Rumah Maggot Bapak Ujang “larva Maggot secara ekonomi bisa dijual untuk pakan ternak”

Struktur Birokrasi tetap harus dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana, adanya koordinasi antar unsur Masyarakat, adanya pendelegasian tugas, adanya pengawasan dan evaluasi untuk tercapainya tujuan dan tersedianya data pelaporan keberhasilan program. Adakalanya struktur birokrasi yang terlalu Panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang kompleks juga. Hasil wawancara dengan Petugas Pengelola

Rumah Maggot Bapak Undang “pada awal program ini memang Masyarakat masih belum terbiasa untuk memilah sampah organik dapur, dengan alasan tidak ada wadah untuk memilahnya”. Hasil wawancara dengan Petugas Pengelola Rumah Maggot Bapak Azis Muslim “masih ada kendala pengangkutan sampah organik yang sudah dikumpulkan oleh warga ke rumah maggot”. Sedangkan hasil wawancara dengan Petugas Pendamping DLHK Bapak Ipul, menyatakan “Sampah organik yang dihasilkan oleh warga kelurahan babakan penghulu sebanyak 25kg perminggu khusus 2 RW saja. Sedangkan daya tampung di rumah maggot bisa mencapai 1 ton perhari”

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat, mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Larva maggot di Kecamatan Cinambo Kota Bandung, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pengelolaan sampah Organik Berbasis Larva Maggot di Kecamatan Cinambo didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan, yaitu Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.2403-DLH/2023 tentang penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana sampah Kota Bandung. Faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi turut mempengaruhi optimalisasi kebijakan.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan dapat berasal dari berbagai aspek yang disebutkan dalam bagan, seperti: Komunikasi antar organisasi yang kurang efektif seperti koordinasi yang lemah antar unsur di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah antara kecamatan, kelurahan dan pengelola maggot. Sumber daya yang belum maksimal, baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas penunjang pengelolaan sampah,

Disposisi pelaksana, yang mencerminkan sikap dan komitmen dari aparat dalam menegakkan kebijakan, yang bisa jadi kurang tegas atau mengalami tekanan untuk menanggulangi darurat sampah. Struktur Birokrasi yang masih lemah terutama dari belum adanya Standard Operation Procedure (SOP).

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan mencakup meningkatkan komunikasi antar organisasi, dengan memperjelas peran masing-masing pihak dalam implementasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang peningkatan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, personel, maupun fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah berbasis larva maggot. Sehingga kebijakan dalam penanggulangan darurat sampah melalui pengelolaan sampah berbasis larva maggot, dan adanya Standard Operation Procedure (SOP) yang disepakati bersama dapat optimal.

#### **Saran**

Beberapa rekomendasi saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model implementasi kebijakan yang lebih efektif dan tidak tergesa-gesa dalam penanggulangan darurat sampah melalui pengelolaan sampah berbasis larva maggot.
2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot di Kota Bandung dengan kota lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menemukan pola kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis larva maggot sebaiknya dikaji dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kebijakan publik, manajemen pengelolaan, ekonomi, dan sosiologi, untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
4. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas

kebijakan penanganan darurat sampah melalui pengelolaan sampah berbasis larva maggot serta melakukan revisi jika diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik.

5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait harus meningkatkan koordinasi untuk memastikan kebijakan penanggulangan darurat sampah melalui pengelolaan sampah berbasis larva maggot dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.
6. Pemerintah sebaiknya menyediakan lokasi rumah maggot yang representative jauh dari pemukiman warga agar tertata rapih dan terhindar dari polusi udara (Bau).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. SAGE Publications
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. SAGE Publications
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications